BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Tri Astuti Handayani

Advokat di Bojonegoro, Jawa Timur

Korespondensi: handayani.astuti61@yahoo.com

Abstrak

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan termiskin masyarakat. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan.

Kata-kata Kunci: Bantuan Hukum; Masyarakat Miskin; Hak Asasi Manusia.

Abstract

Legal aid is an effort to fulfill the human rights, especially of the poorest groups of the society. The Constitution guarantees the right of every citizen to equal treatment before the law, including the right to access justice through legal aid. The haves and those having power would easily access and obtain “justice”, through the hands of advocates employed. That is not the case with the poor who do not have sufficient knowledge of the law and can not afford to pay for lawyers. This situation creates an unequal treatment before the law to access justice.

Key Words: Legal Aid; Poor Groups; Human Rights.

PENDAHULUAN

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya dengan kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan. Masalah dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali.

Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Namun, walaupun mereka sadar akan hak-hak

ini tidak serta merta menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka cari. Sistem hukum disediakan negara bagi mereka dianggap mahal, tidak mudah diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka.¹ Ditambah lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, sehingga masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan.² Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Sampai dengan saat ini, bantuan hukum dilakukan dengan jalan pemberian pendampingan perkara di dalam maupun di luar pengadilan atau bantuan-bantuan dalam perkara perdata dan pidana. Tidak hanya bidang perdata dan pidana yang diberikan bantuan hukum, tetapi termasuk perkara-perkara yang menempatkan Pemerintah menjadi pihak tergugat, dan rakyat menjadi Penggugat yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kegiatan bantuan hukum harus dilakukan lebih terpadu bersama kegiatan penyuluhan hukum, karena ada kesadaran pada waktu itu bahwa program bantuan hukum sebenarnya mempunyai tujuan ganda.

¹ Justice for the Poor dan The World Bank, *Menciptakan Peluang Keadilan* (The World Bank 2005) 85.

² Asfinawati, ‘Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi’ dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (ed) *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan* (LBH Jakarta 2007) vi.

PEMBAHASAN

Pemberian Bantuan Hukum sebagai Wujud Hak Konstitusional Warga Negara

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan termiskin masyarakat. Orang kaya sering tidak butuh bantuan hukum karena sebetulnya pada dasarnya hukum itu dekat dengan orang kaya. Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, bahkan terkadang sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin.³

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pengakuan terhadap HAM terkait dengan *equality before the law* (persamaan di depan hukum) yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *access to justice* (akses

terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*). Sehingga bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum khususnya bagi masyarakat miskin.

Pengertian Bantuan Hukum

Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pem-bayaran sejumlah uang dari klien.⁴

Jadi bantuan hukum yang sesuai dengan makalah ini adalah bantuan hukum dalam arti yang sempit atau *legal aid*. Menurut Adnan Buyung Nasution

³ Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural* (Alumni 1981) 12.

⁴ Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan* (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1997) 4.

bantuan hukum atau (*Legal aid*), merupakan pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

1. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma,
2. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin,
3. Dengan demikian motifasi utama konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU No. 16 Tahun 2011) yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU No. 18 Tahun 2003) menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (PP No. 83 Tahun 2008), menyebutkan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum,

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Beberapa definisi dan penyebutan bantuan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas, sebagian besar menekankan bahwa pegiat bantuan hukum baru dibatasi kepada advokat dan jasa yang diberikannya kepada pencari bantuan hukum yang harus berhadapan dengan pengadilan. Definisi-definisi di atas merupakan definisi yang dianggap “tradisional dan individual” dalam pemberian bantuan hukum. Todung Mulya Lubis mengkritisi bentuk bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual dengan mengemukakan sejumlah kelemahannya yaitu:

- a. Bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual hanya bersifat “mengobati” tetapi tidak mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit tersebut dimana masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya sendiri.
- b. Sistem hukum yang ada masih menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum tradisional dan individual, di mana proses penyelesaian hukum masih berkisar pada pengadilan dan proses beracara yang ada didalamnya
- c. Bersifat kekotaan, karena para ahli hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum ada di perkotaan dan tidak mudah dijangkau oleh

⁵ Adnan Buyung Nasution, dkk, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan* (LBH Jakarta 2007) 13.

- masyarakat perdesaan dan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
- d. Sifatnya pasif, menunggu masyarakat miskin menyadari hak-haknya dan mengklaimnya.
 - e. Terlalu terikat pendekatan-pendekatan hukum, bukan bagaimana membantu penyelesaian secara cepat atau mengatasi konflik.
 - f. Masih berjalan sendiri, tidak bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum, padahal organisasi bantuan hukum dianggap paling cepat menyelesaikan konflik.
 - g. Belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial, dimana gerakan bantuan hukum dikaitkan dengan *power resources* sehingga posisi masyarakat akan lebih kuat dan mempercepat penyelesaian konflik pusat pimpinan.⁶

Hakikat, Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum

Pada hakikatnya, pemberian bantuan Hukum kepada masyarakat miskin yang diberikan oleh Advokat, tidak terlalu berbeda dengan konsep Bantuan Hukum diberikan oleh Advokat pada umumnya. Yaitu bantuan hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 16 Tahun 2011 yang mengatur bahwa:

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.

- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Yang membedakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan bantuan hukum umumnya terletak pada penerima bantuan hukum yang diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin dan diberikan secara cuma-cuma. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dengan melihat hakikat bantuan hukum tersebut, maka organisasi-organisasi bantuan hukum sangat

⁶ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* (LP3ES 1986) 51-55.

diperlukan. Paling tidak terdapat empat fungsi yang dijalankan melalui pemberian bantuan hukum yaitu:

1. Dengan adanya bantuan hukum akan terwujud persamaan di hadapan hukum. Proses hukum yang *fair* dan *impartial* hanya akan terjadi apabila pihak-pihak yang bersengketa memiliki posisi dan kekuatan yang seimbang, terutama dari sisi pengetahuan dan keterampilan hukum;
2. Apabila proses hukum berjalan secara *fair* dan *impartial*, semua kebenaran materiil dapat terungkap. Dengan adanya posisi dan kekuatan yang seimbang, manipulasi dan hegemoni atas fakta dan kebenaran dapat dicegah. Dengan demikian, bantuan hukum berfungsi memperkuat upaya menegakkan keadilan substansial melalui proses hukum yang *fair* dan *impartial*;
3. Bantuan hukum memberikan ruang interaksi antara para ahli dan profesi hukum dengan masyarakat umum. Interaksi itu akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bagaimana memposisikan suatu aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Jika terdapat permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk pada saat terdapat aturan yang merugikan hak konstitusional warga negara juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Bantuan hukum berfungsi untuk membangun budaya kepatuhan terhadap hukum sebagai salah satu

ciri utama masyarakat yang beradab;

4. Kepatuhan terhadap hukum hanya akan berkembang pada saat masyarakat memahami kedudukan dan materi aturan hukum. Pemahaman tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat yang sangat diperlukan, baik untuk melakukan hubungan hukum, menjalani prosedur hukum, bahkan untuk mengkritisi materi serta praktik penegakan hukum.

Selain mengemban fungsi di atas, pemberian bantuan hukum menurut Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 juga mempunyai tujuan:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan Hukum dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat merupakan suatu keadilan yang disediakan oleh sistem hukum yang berdimensi spiritual (rohaniah) dan

material (kebendaan). Teori keadilan bermartabat merupakan teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan dijawab oleh sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Istilah adil dan beradab sebagaimana yang dimaksud dalam sila kedua Pancasila tersebut, oleh Notonagoro dimaknai dengan rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap Tuhan (*causa prima*). Dengan dilandasi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut, maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia. Oleh Teguh Prasetyo keadilan yang memanusiakan manusia disebut sebagai teori keadilan bermartabat.⁷ Dalam artian bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut harus tetap diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Sehingga keadilan bermartabat merupakan keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.⁸

Teori Keadilan Bermartabat mendukung kebijakan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana yang berorientasi kepada filosofi hukum untuk manusia. Artinya, hukum, termasuk pengaturan mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu, harus melayani

manusia. Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, bantuan hukum dengan demikian bukan sebaliknya membawa manusia pencari keadilan yang tidak mampu untuk harus ditundukkan atau berhambra kepada peraturan perundang-undangan, seperti misalnya UU No. 18 Tahun 2003; kecuali hukum menghendakinya. Mutu hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, khususnya UU No. 18 Tahun 2003, ditentukan oleh kemampuan mereka yang memahami peraturan-perundang undangan itu untuk diarahkan pengertiannya kepada mengabdikan kesejahteraan manusia. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Teguh Prasetyo:

Hukum menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum – termasuk dalam hal ini yaitu pengaturan tentang Bantuan Hukum bagi mereka yang tidak mampu – untuk memanusiakan manusia. Artinya, bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.⁹

Ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat, pemberian bantuan

⁷ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Nusa Media 2015) 109.

⁸ *Ibid.*

⁹ Tri Astuti Handayani, 'Pengaturan Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana sebagai Upaya Memenuhi Hak Tersangka atau Terdakwa yang Tidak Mampu

hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan salah satu perwujudan dari memanusiakan manusia, yaitu perwujudan dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu tetap harus mendapatkan bantuan dan pembelaan oleh advokat. Hal tersebut juga merupakan wujud dari persamaan di depan hukum. Meskipun orang tersebut tidak mampu tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Salah satu bentuk hak tersebut adalah memperoleh pembelaan dan bantuan hukum. Sebagai penerima bantuan hukum berhak:

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mendapatkan hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU No. 16 Tahun 2011, penerima bantuan hukum juga wajib:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

PENUTUP

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan wujud dari pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara terutama hak persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin juga merupakan wujud pemberian keadilan terutama keadilan yang bermartabat. Yaitu keadilan yang memanusiakan manusia, yaitu perwujudan dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu tetap harus mendapatkan bantuan dan pembelaan oleh advokat. Hal tersebut juga merupakan wujud dari persamaan di depan hukum. Meskipun orang tersebut tidak mampu tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

¹ (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 2015)
112.

DAFTAR BACAAN**Buku**

Justice for The Poor – The World Bank,
Menciptakan Peluang Keadilan (The
World Bank 2005).

Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum
dan Kemiskinan Struktural* (LP3ES
1986).

Nasution, Adnan Buyung, dkk, *Bantuan
Hukum: Akses Masyarakat Marginal
terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah,
Konsep, Kebijakan, Penerapan dan
Perbandingan* (LBH Jakarta 2007).

Nusantara, Abdul Hakim Garuda, dan
Mulyana W. Kusumah, *Beberapa
Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum
Struktural* (Alumni 1981).

Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat
Perspektif Teori Hukum* (Nusa Media
2015).

Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan
Hukum Bagi Masyarakat dalam
Memperoleh Keadilan* (Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro
1997).

Kontributor Buku

Asfinawati, 'Prolog: Bantuan Hukum
Cuma-Cuma dan Komersialisasi'
dalam Lembaga Bantuan Hukum
Jakarta, *Bantuan Hukum Akses
Masyarakat Miskin dan Marjinal
terhadap Keadilan* (LBH Jakarta
2007).

Disertasi

Handayani, Tri Astuti, *Pengaturan
Bantuan Hukum Dalam Perkara
Pidana Sebagai Upaya Memenuhi*

*Hak Tersangka Atau Terdakwa Yang
Tidak Mampu* (Disertasi, Program
Doktor Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Tujuh Belas
Agustus 2015).

Seminar

Pujiono, 'Bantuan Hukum dalam
Perspektif Tanggungjawab Negara'
(Seminar Bantuan Hukum dan
Akses terhadap Keadilan Bagi
Masyarakat Marginal, Semarang,
Pebruari 2010).